



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Soppeng untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal, maka diperlukan pengaturan penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - c. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Daerah terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;

- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk

- penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
- b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.

- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;

- d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah bersama dengan Tim Penerapan SPM serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Dasar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - e. anggota :
 - a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Inspektur Daerah;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

- (2) Tim Penerapan SPM kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Soppeng dan melakukan analisis sebagai Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penerapan SPM Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Soppeng, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (4) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi
- (5) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 24 Tahun 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

**A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
SPM PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi
- b) Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar
- d) Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar Literasi dan Numerasi
- e) Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan PAUD
- f) Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

- a) Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten
- b) Rekapitulasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Per Kabupaten

B. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten
- b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari:

- a) Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten
- b) Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Kesehatan dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

- a) Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
- b) Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan
- b) Kondisi SPALD Kabupaten

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari:

- a) Rumah Terlayani SPAM Kabupaten
- b) Rumah Terlayani SPALD Kabupaten

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Pemenuhan Air Minum Kabupaten
- b) Penyusunan Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik Kabupaten

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten adaah sebagai berikut:

- a) Capaian Layanan Air Minum Kabupaten
- b) Capaian Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana, meliputi:

- 1) Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten
- 2) Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Kabupaten
- 3) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten

b) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah, meliputi:

- 1) Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Di Kabupaten
- 2) Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten
- 3) Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten
- 4) Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari:

a) Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Kabupaten meliputi:

- 1) Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten
- 2) Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten

b) Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten

- 1) Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten

2) Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Menjelaskan tentang rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten

b) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Menjelaskan tentang rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar perumahan rakyat daerah kabupaten adaah sebagai berikut:

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Menjelaskan tentang rincian capaian pelaksanaan spm masyarakat yang terkena bencana kabupaten -N

b) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Menjelaskan tentang rincian capaian pelaksanaan spm masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten tahun-N

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

a) Warga Negara yang Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi

Penegakan Perda dan Perkada

- b) Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda Dan Perkada
 - c) SOP Kegiatan Penegakan Perda/Perkada
 - d) Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Perangkat Daerah Satpol PP
 - e) Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh Perangkat Daerah Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas)
 - f) Perda Perkada yang Akan Ditegakkan
 - g) Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter
 - h) Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Yang Rusak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari:
- a) Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
 - b) Kebutuhan Penyusunan SOP
 - c) Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP, PPNS, Satlinmas
 - d) Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Satpol PP
 - e) Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan kerangka pendanaan yaitu sebagai berikut:
- a) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kerangka Pendanaan Kabupaten
 - b) Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP Kabupaten
 - c) Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kabupaten
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar perumahan rakyat daerah kabupaten yaitu sebagai berikut:
- a) Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub

Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos Dan Aset
Warga Negara Kabupaten

- b) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kabupaten
- c) Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP Kabupaten

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Pendataan SPM Damkar Kabupaten
- b) Relawan Kabupaten
- c) Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran yang terdiri dari:

- a) Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit
- b) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
- c) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
- d) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran
- e) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran Kabupaten tentang penyusunan rencana pelayanan dasar Pemadam Kebakaran

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
- b) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran) Kabupaten

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Penaggulangan Bencana

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Warga Negara yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana
- b) Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara
- c) Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa
- d) Aparat dan Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana
- e) Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan
- f) Warga Negara Wajib Latih
- g) Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana
- h) Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian
- i) Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana
- j) Status Korban Bencana
- k) Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana
- l) Kejadian Bencana

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Penaggulangan Bencana yang terdiri dari:

- a) Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- b) Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- b) Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Penanggulangan Bencana Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- b) Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

F. Bidang Urusan Sosial

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Pengumpulan data

Menjelaskan target dan indikator kinerja pencapaian penerapan standar pelayanan minimal, yang terdiri dari:

- a) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis
- b) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Yang Memerlukan Pelayanan Di Luar Panti dan Di Lembaga
- c) Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
- d) Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial
- e) Sarana dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial Daerah Kabupaten

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
- b) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Menjelaskan tentang Rencana pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Dalam Panti
 - b) Pemenuhan Korban Bencana Alam dan Sosial Diwilayah Kabupaten
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- Menjelaskan capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten adalah sebagai berikut:
- a) Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti
 - b) Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Diwilayah Kabupaten

BAB III PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya

dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Pemadam Kebakaran

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya

dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Penanggulangan Bencana

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

d. APBN;

e. APBD; dan

f. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya

dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yaitu jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian yaitu target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran yaitu alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya perlu melaporkan realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh

Pemerintah Daerah yang bersangkutan

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian yaitu realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yaitu hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

Lampiran

(disesuaikan data form setiap pemangku SPM)

A. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN PENDIDIKAN								
1	PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Nemurasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap Tahun				
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasat atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
URUSAN KESEHATAN								
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Ibu Hamil yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Ibu Bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Bayi Baru Lahir yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Balita yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Pendidikan Dasar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Produktif yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberklosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Terduga Tuberklosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
URUSAN PEKERJAAN UMUM								
1	PENYEDIA KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Ait Minum Sehari-Hari	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Ait Minum Sehari-Hari)	Setiap Tahun	

2	PEYEDIA PELAYANAN PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolaan Limbah Domestik)	Setiap Tahun	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	PENYEDIA DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

URUSAN TRANTIBUM LINMAS								
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
2	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4	PELAYANAN PENYELAMATAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
URUSAN SOSIAL								
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Warga Negara Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
---	--	---	------	--------------	---	--	--------------	--

B. FORMAT TAHAPAN PENERAPAN SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA

- FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI
- FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR
- FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI
- FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PAUD
- FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
- FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

- FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN
- FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

1.A. 2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 6 TAHUN PADA KAB/ KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NON FORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPASRTISIPASI PADA FORMAL DAN NON FORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini										
	A. PENDIDIKAN FORMAL										
	1 TK. A										
	2 TK. B										
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. PENDIDIKAN NON FORMAL										
	1 TK. A										
	2 TK. B										
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pendidikan Dasar										

	I. SEKOLAH DASAR										
1	SD. A										
2	SD. B										
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA										
1	SMP. A										
2	SMP. B										
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. SEKOLAH KESETARAAN										
	A. PAKET A										
1	PAKET A SEKOLAH A		0		0		0		0		0
	A. PAKET B										
1	PAKET B SEKOLAH A		0		0		0		0		0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Jumlah Peserta Didik Bersumber dari Data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah Bersumber dari Data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform rapor pendidika Kemendikbudristek

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor Urut
- Kolom 2 : Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Sesuai dengan PP 2 Tahun 2018 dengan mengurai nama sekolah formal/non formal
- Kolom 3 : Jumlah Peserta didik Usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
- Kolom 4 : jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 5 : jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
- Kolom 6 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/PAKET B
- Kolom 8 : Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 9 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
- Kolom 10 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada paud formal dan non formal dari kuintil terendah
- Kolom 12 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada paud formal dan non formal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan

1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK/ (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEK DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI						
	A. PENDIDIKAN FORMAL						
	TOTAL						
	B. PENDIDIKAN NON FORMAL						
	TOTAL						
	TOTAL KESELURUHAN						
2	PENDIDIKAN DASAR						
	I. SEKOLAH DASAR						
	TOTAL						
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA						
	TOTAL						
	III. SEKOLAH KESETARAAN						

	A. PAKET A						
	A. PAKET B						
	TOTAL						
	TOTAL KESELURUHAN						

- jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari kemendikbudristek
- jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari kemendikbudristek
- jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari kemendikbudristek
- jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari kemendikbudristek
- indeks distribusi guru tahun N bersumber dari kemendikbudristek
- indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari kemendikbudristek
- data akan tersedia di platform rapor pendidikan kemendikbudristek

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sesuai PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari kemendikbudristek
- Kolom 5 : jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas daerah
- Kolom 6 : jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota
- Kolom 7 : indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 8 : indeks distribusi guru tahun N-1

1. A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)				
	I. SEKOLAH DASAR				
	TOTAL				
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA				
	TOTAL				
	III. SEKOLAH KESETARAAN				
	A. PAKET A				
	A. PAKET B				
	TOTAL				
	TOTAL KESELURUHAN				

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemendikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemendikbudristek
- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemendikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform rapor pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN :

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : jenis Pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun n semua peserta asesmen nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional

Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional

Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun n semua peserta asesmen nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional

Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun n-1 semua peserta asesmen nasional

1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/kesetaraan)								
	I. SEKOLAH DASAR								
	TOTAL								
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA								
	TOTAL								
	III. SEKOLAH KESETARAAN								
	A. PAKET A								
	A. PAKET B								
	TOTAL								
	TOTAL KESELURUHAN								

- Skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari kemendikbudristek
- Skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari kemendikbudristek
- Skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari kemendikbudristek
- Skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari kemendikbudristek
- Skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari kemendikbudristek
- Skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari kemendikbudristek
- Skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan asesmen nasional bersumber dari kemendikbudristek
- Skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan asesmen nasional bersumber dari kemendikbudristek
- data akan tersedia di platform rapor pendidikan kemendikbudristek

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : jenis Pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata skor literasi peserta didik berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 4 : Rata-rata skor literasi peserta didik berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 5 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 6 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 7 : Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 8 : Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 9 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 10 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan asesmen nasional

1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PAUD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B			PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD		
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B			JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DI AKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PRESENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PRESENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
		A	B	C					
1	2	3			4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini								
	A. PENDIDIKAN FORMAL								
	1 TK. A								
	2 TK. B								
	TOTAL								
	B. PENDIDIKAN NON FORMAL								
	1 TK. A								
	2 TK. B								
	TOTAL								
	TOTAL KESELURUHAN								

- Jumlah satuan PAUD bersumber dari kemendikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari kemendikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari kemendikbudristek
- data akan tersedia di platform rapor pendidikan kemendikbudristek

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : jenis Pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan paud yang telah di akreditasi di kab/kota tersebut
- Kolom 5 : Presentase pendidik paud dengan S1/D-IV pada tahun N
- Kolom 6 : Presentase pendidik paud dengan S1/D-IV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas sekolah untuk tk ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
- Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/MI/SMP/MTS/Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/KESETARAAN)				
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA				
	TOTAL				
	III. SEKOLAH KESETARAAN				
	A. PAKET A				
	A. PAKET B				
	TOTAL				
	TOTAL KESELURUHAN				

- indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemendikbudristek
- indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemendikbudristek
- data akan tersedia di paltfrm rapor pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : jenis Pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan asesmen nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 6 : Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan asesmen nasional

1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
1	Program SPM Pendidikan anak usia dini	persentase penduduk usia 5-6 tahun	Kegiatan Pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun	1	Tersedianya data	peserta didik			
				2	penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 kali per tahun	2	Terselenggaraanya Sosialisasi	kegiatan			
				3	pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	peserta didik			
				4	penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 satuan PAUD di setiap desa	4	Peserta didik terlayani	peserta didik			

			5	penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani	peserta didik					
			6	penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang di tetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	6	Peserta didik terlayani	peserta didik					
		kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	pemberian layanan pendampingan bagi satuan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya kegiatan pendampingan	kegiatan					
			2	fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2	terselenggaranya kegiatan pelatihan/Seminar/Lokakarya	kegiatan					
			3	sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan PAUD yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	3	Terselenggaranya Sosialisasi	kegiatan					

					tahun ajaran								
				4	pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	kegiatan					
				5	pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	kegiatan					
			memenuh an jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	pendidik dan tenaga kependidikan					
				2	pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan					

				3	pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan Formasi Guru	guru						
				4	penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	kegiatan						
				5	penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	kegiatan						
				6	penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	kegiatan						
				7	pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan PAUD	7	Tersedianya data	pengawas atau penilik						

			pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	kegiatan					
				2	beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	beasiswa atau bantuan biaya kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	kepala sekolah atau guru yang mengikuti pelatihan	kegiatan					
2	program SPM pendidikan dasar	persentase penduduk usia 7-15 tahun	kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B)	1	pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (limabelas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	peserta didik					
				2	pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dan keluarga tidak mampu sampai	2	Bantuan biaya pendidikan	peserta didik					

					lulus								
				3	penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	peserta didik					
				4	penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang di tetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	peserta didik					
		pemuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (SD/MI/SMP/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan Komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	unit komunitas						
			2	pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	kegiatan						
		pemuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk menegakkan perundangan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	kegiatan						

				2	pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	kegiatan					
				3	perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	kegiatan					
				4	sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	kegiatan					

			pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	pendidik dan tenaga kependidikan					
				2	pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan Formasi Guru	guru					
				4	penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	kegiatan					

				5	penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	kegiatan					
				6	penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	kegiatan					
				7	pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan Pendidikan	7	Tersedianya data	kegiatan					
			pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	peningkatan kualitas dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan	1	peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	kegiatan					

				2	pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	beasiswa atau bantuan biaya kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan						
				3	fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	kepala sekolah atau guru yang mengikuti pelatihan	kegiatan						

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada peremendagri nomor 90 tahun 2018
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada peremendagri nomor 90 tahun 2018
- Kolom 6 : Diisi dengan output dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan permasing masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang kolom 9)

1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1 Tersedianya Data	Peserta didik																			
				2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																			
				3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3 Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik																			
				4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik																			

			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan																
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5 Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan																
Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																	

2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan																	
3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru																	
4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan																	
5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan																	
6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan																	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

No	KELUARAN (Output)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN(%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik									
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan									
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang di berikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan PAUD	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik terlayani (PAUD)	Peserta didik									
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik									

6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik									
7	Jumlah pendampingan bagi satuan PAUD	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pendidikan/seminar/lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan									
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan									
10	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan									
11	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan (PAUD)	Kegiatan									
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	pendidik dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	pendidik dan tenaga kependidikan									

14	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	guru									
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan									
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan									
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan									
18	Jumlah data pemetaan kecukuan Jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	pengawas atau penilik									
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memnuhi kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan (PAUD)	Kegiatan									
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di beri beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	pendidik dan tenaga kependidikan									

21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan									
22	Jumlah data warga negara usia tujuh 7(tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik									
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan diwilayah yang kekurangan daya tampung (SD/MI/SMP/MTs/Kesetaraan)	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang di tetapkan sebagai daerah terdepan, terluar ,dan tertinggal (SD/MI/SMP/MTs/Kesetaraan)	Peserta didik									
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	unit komunitas									
27	Jumlah pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru SD/SMP/Kesetaraan	Kegiatan									
28	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak SD/SMP/Kesetaraan	Kegiatan									

29	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana SD/SMP/Kesetaraan	Kegiatan									
30	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana prasarana satuan pendidikan yang rusak SD/SMP/Kesetaraan	Kegiatan									
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku dan budaya, kepada satuan pendidikan (SD/SMP/Kesetaraan)	Kegiatan									
32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/DMP/Kesetaraan)	pendidik dan tenaga kependidikan									
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Kesetaraan)	pendidik dan tenaga kependidikan									
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan (SD/SMP/Kesetaraan)	guru									
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/SMP/Kesetaraan)	Kegiatan									

36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/DMP/Kesetaraan)	Kegiatan									
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/DMP/Kesetaraan)	Kegiatan									
38	Jumlah data pemetaan kecukupan Jumlah pengawas sekolah penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (SD/DMP/Kesetaraan)	pengawas atau penilik									
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memnuhi kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan (SD/DMP/Kesetaraan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di beri beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/DMP/Kesetaraan)	pendidik dan tenaga kependidikan									
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/DMP/Kesetaraan)	Kegiatan									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis Keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi perjenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah presentase capaian fisik perjenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah presentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

**FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN (%)					
		PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
- Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
- Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
- Kolom 6 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan menengah
- Kolom 7 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan

1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan Anak Usia Dini								
	USIA 0-5 Tahun								
	A. PENDIDIKAN FORMAL								
	1 TK. A								
	2 TK. B								
	TOTAL								
	B. PENDIDIKAN NON FORMAL								
	1 TK. A								
	2 TK. B								
	TOTAL								
	Pendidikan Dasar								
	I. SEKOLAH DASAR								
	1 SD. A								
	2 SD. B								
	TOTAL								
	II. SEKOLAH MENEGAH PERTAMA								

	1 SMP. A								
	2 SMP. B								
	TOTAL								
	III. SEKOLAH KESETARAAN								
	A. PAKET A								
	PAKET A 1 SEKOLAH A								
	TOTAL								
	A. PAKET B								
	PAKET B 1 SEKOLAH A								
	TOTAL								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari dukcapil
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil penerapan SPM
Kolom 5 : capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (Satuan pendidikan,PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerimaan dan standar teknis
Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
Kolom 8 : capaian (%) adalah realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%
Kolom 9 : capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
Kolom 10 : kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT			PARTISIPASI PESERTA DIDIK			HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5-6	UMUR 7-15	UMUR 7-18	UMUR 5-6	UMUR 7-15	UMUR 7-18	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Pendidikan Anak Usia Dini										
	1										
	2										
	3										
2	Pendidikan Dasar										
	1										
	2										
	3										
3	Pendidikan Kesetaraan										
	1										
	2										
	3										

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK LAYANAN DASAR KESEHATAN

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi Nama Kelurahan / Desa
- Kolom 4 s.d 15 : Diisi dengan Total Sasaran Penerima Per Jenis Pelayanan SPM

2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didaerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh Kementrian yang penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dilapangan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada difasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh Kementerin yang penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan
- Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dilapangan

**2.B.4 PERHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN KELENGKAPAN DASAR KESEHATAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

N O	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUH AN	JUMLAH KETERSEDIA AN	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (5x7)	9
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	1						
		2						
		3						
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	1						
		2						
		3						
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	1						
		2						
		3						
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	1						
		2						
		3						
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	1						
		2						
		3						
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	1						
		2						
		3						
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	1						
		2						
		3						
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	1						
		2						
		3						

9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS							
		1						
		2						
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	3						
		1						
		2						
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS	3						
		1						
		2						
12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	3						
		1						
		2						
JUMLAH								

Keterangan Diisi Nomor Urut

Kolom 1 :

Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan Dasar berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan kelengkapan) sesuai jenis layanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis layanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat difungsikan sesuai dengan standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurangi kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan atuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan sesuatu yang bersifat khusus/spesifik

2.B.5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	
12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)		org	org	0 org	
		a. Dokter	org	org	0 org	
		b. Suster	org	org	0 org	
		c. Bidan	org	org	0 org	
		e. dst	0	

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan Dasar berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Permen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Permen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini
- Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
- Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan sesuatu yang bersifat khusus/spesifik

2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2021-2026

NO	KODE)*	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM OUTCOME	KONDISI KINERJA PADA AWALTAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	
					TAHUN N-1 2021		TAHUN N-2 2022		TAHUN N-3 2023		TAHUN N-4 2024		TAHUN N-5 2025		2026		
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)		Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait dengan Pelayanan Dasar Kesehatan															
	1 02	Urusan Pemerintahan Urusan Kesehatan															
	1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															

Keterangan

Kolom 1 : Diisi Nomor Urut

Kolom 2 : Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan/Program

Kolom 3 : Diisi nama Urusan/Bidang Urusan/Program

Kolom 4 : Diisi dengan Indikato Kinerja Program (Outcome)

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (Tahun N) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6 s.d 10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap Indikator Kinerja pada program RPJMD Kabupaten/kota pada tahun berkenaan

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir priode RPJMD Kabupaten/Kota

Kolom 12 : Diisi dengan unit perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program

)* : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STARATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

NO	KODE)*	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM OUTCOME)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANA AN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB	
					TAHUN N-1 2021		TAHUN N-2 2022		TAHUN N-3 2023		TAHUN N-4 2024		TAHUN N-5 2025		2026		
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait dengan Pelayanan Dasar Kesehatan													DINAS KESEHATAN		
	1 02	Urusan Pemerintahan Urusan Kesehatan													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.03 0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.03 0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.03 0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.03 0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													DINAS KESEHATAN		

1	02	02	2.03	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)															DINAS KESEHATAN

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan/Program
- Kolom 3 : Diisi nama Urusan/Bidang Urusan/Program
- Kolom 4 : Diisi dengan Indikato Kinerja Program (Outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (Tahun N) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6 s.d 10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap Indikator Kinerja pada program RPJMD Kabupaten/kota pada tahun berkenaan
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir priode RPJMD Kabupaten/Kota
- Kolom 12 : Diisi dengan unit perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
-)* : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL									
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN									
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR									
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA									
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR									
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF									
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT									
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI									
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS									
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA									
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS									

12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)									
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan Dasar berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis layanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan dasar (nominator) pada Tahun N
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Tahun N
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pelayanan dasar (%) untuk pelayanan dasar pada Tahun N yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setia jenis layanan dasar pada Tahun N
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi anggaran untuk setiap jenis layanan dasar pada Tahun N
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian realisasi anggaran pelayanan dasar (%) untuk pelayanan dasar pada Tahun N yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Tahun N
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan solusi dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota

**2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMAAN PELAYANAN DASAR			PENYEDIA MUTU PELAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2								
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL								
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN								
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR								
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA								
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR								
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF								
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT								
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI								
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS								
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA								
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS								
12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)								
NILAI DAN KATEGORI									

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Layanan Dasar berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyedia mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis pada form D.2
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal layanan dasar pada form D.2
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerimaan pelayanan dasar (%) untuk kebutuhan minimal penyedia mutu yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setia jenis layanan dasar pada Tahun N pada form B.5
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi anggaran untuk setiap jenis layanan dasar pada Tahun N pada form B.5
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian realisasi anggaran pelayanan dasar (%) untuk pelayanan dasar pada Tahun N yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Tahun N
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota

III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENGUMPULAN DATA

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM
KABUPATEN/KOTA

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD
KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH
DOMESTIK KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

FORM 3.D.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA

FORM 3.D.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH
DOMESTIK KABUPATEN/KOTA

**3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PERODUKSI		UNIT PELAYANAN					KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPASITY (liter/detik)	PDAM	UPTD	BA	USAHA	KP SPM	OPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13
	Jumlah								0	1	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll
- Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku
- Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku
- Kolom 7 : Diisi kapasitas intakeunit air baku dalam satuan liter/detik
- Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 9 : Diisi Idle Capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 10 : Diisi unit pelayanan pengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelolah SPM)
- Kolom 11 : Diisi "Operasi/Tidak Operasi" sesuai kondisi yang ada
- Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" bila kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
- Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai dengan ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan

3.A.4 KONDISI SPAL-D

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN

NO	NAMA SPAL-D	LOKASI SPAL-D	KONDISI SPAL-D REGIONAL (BEROPEARASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
						TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	(M ³ /Liter)	KK	(M ³ /Liter)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah						0		0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAL-D (terbangung IPAL/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi dengan lokasi SPAL-D (terbangung IPAL/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" bila IPAL/IPLT masih beroperasi dan "tidak" bila IPAL/IPLT jika tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 6 : Diisi nama desa/kelurahan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 7 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPAL-D
- Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPAL-D
- Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPAL-D yang terpakai/ termanfaatkan
- Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang terlayani oleh SPAL-D

**3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM
KEBUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KEPENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		>10 m	<10 m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL								0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan RW
- Kolom 5 : Diisi dengan RT
- Kolom 6 : Diisi nama kepala keluarga
- Kolom 7 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu keluarga terdapat dua KK cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 8 : Diisi jumlah penghuni yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 9 : Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga <UMP
- Kolom 10 : Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga >UMP
- Kolom 11 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 13 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut tidak terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
- Kolom 14 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air kepenampungan pengotoran/limbah >10 M
- Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air kepenampungan pengotoran/limbah <10 M

**3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPAL-D
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TENK AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYANAN PEDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T									
											MBR	NON MBR	BABS	CUPLUK PERKOTAAN		CUPLUK	TANGKI SEPTI TANK INDIVIDU	TANGKI SEPTI TANK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDU	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	SPALD PEMUKIMAN	SPALD KAWASAN TERTENTU	SPALD PERKOTAAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
TOTAL											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan RW
- Kolom 5 : Diisi dengan RT
- Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di wilayah desa/kelurahan (jumlah penduduk di desa/kelurahan dibagi dengan luas wilayah desa/kelurahan (ha))
- Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi "perkotaan" atau "perdesaan" untuk setiap desa/kelurahan berdasarkan peraturan kepala BPS terbaru tentang klasifikasi perkotaan dan pedesaan di Indonesia.
- Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap desa/kelurahan sesuai dengan data SKK dan/atau RISPALD (1*resiko sanitasi rendah, 2*resiko renda, 3*resiko tinggi, 4*resiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK Kepala Keluarga (jika dalam satu keluarga terdapat dua KK cukup diisi satu NIK Kepala Keluarga)
- Kolom 11 : Diisi jumlah penghuni yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga <UMP
- Kolom 13 : Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga >UMP
- Kolom 14 : Diisi dengan angka 1 bila penghuni masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut masuk wilayah perkotaan, namun akses pengelolaan air limbah domestik menggunakan cubluk
- Kolom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut masuk wilayah perdesaan, namun akses pengelolaan air limbah domestik menggunakan cubluk
- Kolom 17 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi dengan angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 20 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengelolaan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah air limbah domestiknya diolah di IPLAD Pemukiman
- Kolom 23 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah air limbah domestiknya diolah di IPLD Kawasan Tertentu
- Kolom 24 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah air limbah domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

**3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%		Rp -	
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%		Rp -	
		- Sub Kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
		- Sub Kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
		- Sub Kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
		dst	dst					
		2 dst	dst			%		Rp -
		- Sub Kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
		- Sub Kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
		- Sub Kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
dst	dst							

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Jenis Layanan Dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota sesuai nomenklatur Kepmendagri Nomor 50/2020 hasil pemutahiran Permendagri Nomor 90/2019
- Kolom 4 : Diisi dengan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan target satuan sesuai kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan / peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan Rp
- Kolom 9 : Diisi dengan OPD Pelaksana

**RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Layanan Pengelolaan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%		Rp -	
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses layanan pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%		Rp -	
		- Sub Kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
		- Sub Kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
		- Sub Kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
		dst	dst					
		2 dst	dst			%		Rp -
		- Sub Kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
		- Sub Kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
		- Sub Kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
		dst	dst					

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Jenis Layanan Dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Air Limbah Kabupaten/Kota sesuai nomenklatur Kepmendagri Nomor 50/2020 hasil pemutahiran Permendagri Nomor 90/2019
- Kolom 4 : Diisi dengan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Air Limbah Kabupaten/Kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan target satuan sesuai kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan / peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan Rp
- Kolom 9 : Diisi dengan OPD Pelaksana

**3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1			0	0	0	0
2			0	0	0	0
Total *)			0	0	0	0

Keterangan

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama desa/kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang ada dalam satu Desa/Kelurahan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP) dalam satu desa/kelurahan

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Bukan Perpipaan (SPAM-JBP) dalam satu desa/kelurahan

Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang belum terlayani Sistem SPAM-JP dan/atau SPAM-JBP dalam satu desa/kelurahan

*) : Jumlah Total target dan Jumlah Total Realisasi

**3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES DASAR LAYANAN PEDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang ada dalam satu Desa/Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah target Rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam satu Desa/Kelurahan
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah target Rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) ada dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah target Rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) ada dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki akses dasar dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki akses layak dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki akses aman SPALD-S dalam satu desa/kelurahan
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki akses aman SPALD-T dalam satu desa/kelurahan
- *) : Jumlah Total target dan Jumlah Total Realisasi

**3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

JENIS LAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/ KOTA	REALISASI			KET
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari					

Keterangan

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidk perlu dibah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang ada di kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (terlayani JP+terlayani JBP)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) di bagi jumlah total rumah di Kabupaten/Kota (kolom 2) di kali 100%
- Kolom 6 : Diisi bila nilai (<60 "BULUM TUNTAS, 61-69 "TUNTAS MUDA", 70-69 "TUNTAS PTARAMA", 80-89 "TUNTAS MADYA, 90-99 "TUNTAS UTAMA, 100 "TUNTAS PARIPURNA")

**3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

JENIS LAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPALD REGIONAL	REALISASI			KET
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik Regional LintasKabupaten/Kota					

Keterangan

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidk perlu dibah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD di kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses SPALD Regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah rumah yang belum terlayani akses SPALD Regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah rumah yang sudah terlayani kolom 3 di bagi jumlah total target rumah yang dilayani SPALD (kolom 2) di kali 100%
- Kolom 6 : Diisi bila nilai (<60 "BULUM TUNTAS, 61-69 "TUNTAS MUDA", 70-69 "TUNTAS PTARAMA", 80-89 "TUNTAS MADYA, 90-99 "TUNTAS UTAMA, 100 "TUNTAS PARIPURNA")

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH

LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

**4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANAN (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSU/ LINGKUNGAN	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
												RTLH	RLH	HAK MILIK	HAK SEWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	**)														
1			LALABATA					0	0	0	0	0	0	0	0
Total .1 *)								0	0	0	0	0	0	0	0
***)															
1			LALABATA					0	0	0	0	0	0	0	0
Total .2 *)								0	0	0	0	0	0	0	0
**)															
1			LALABATA					0	0	0	0	0	0	0	0
Total .3*)								0	0	0	0	0	0	0	0
Total Keseluruhan (1+2+3+dst) *)								0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis bencana (**)Kebakaran, (***)Banjir, (****)Tanah Lonsor, dsb)
- Kolom 3 :
Diisi "rendahsedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana diwilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 6 : Diisi dengan dusun/lingkungan yang terkena dampak bencana
- Kolom 7 : Diisi RW
- Kolom 8 : Diisi RT
- Kolom 9 : Diisi dengan luas perumahan yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah rumah (unit) di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi dengan Kepala Keluarga yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi dengan jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah Rumah Layak Huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah Rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah Rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total Jumlah masing-masing bencana dari data kolom 8 s.d kolom 16
- *) : Total Jumlah dari data kolom 8 s.d kolom 17

**4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS LAHAN	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama desa/kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan luas lahan potensial sebagai lokasi relokasi (ha) perumahan
- Kolom 5 : Diisi dengan pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi Keterangan

**4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIA DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSUN LINGKUNGAN	JUMLAH RUMAH RUSAK *)	TINGKAT KERUSAKAN			STATUS KEPEMILIKAN		
							RUSAK RINGAN *)	RUSAK SEDANG *)	RUSAK BERAT *)	HAK MILIK *)	SEWA *)	LAIN-LAINNYA *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kebakaran											
1						0	0	0	0	0	0	0
					total	0	0	0	0	0	0	0
	Angin PutingBelium											
1						0	0	0	0	0	0	0
					total	0	0	0	0	0	0	0
	Banjir											
1						0	0	0	0	0	0	0
					total	0	0	0	0	0	0	0
	Lonsor											
1						0	0	0	0	0	0	0

					total	0	0	0	0	0	0	0
	Dst											
1						0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Kejadian Bencana alam atau Bencana non alam (Kebakaran, Tanah Lonsor, Banjir, dst)
- Kolom 3 : Diisi Tahun Kejadian
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi dengan nama Kelurahan / Desa tempat kejadian bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan nama lingkungan/dusun tempat kejadian bencana
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak dengan tingkatan kerusakan rumah < 30%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak dengan tingkatan kerusakan rumah 30% - 40%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang rusak dengan tingkatan kerusakan rumah > 45%%
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang rusak dengan tingkatan kerusakan rumah < 30%
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah rumah yang rumah sewa atau kontrak
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat
- *) : Kolom 7-13 disi Jumlah total keseluruhan rumah

**4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DILOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIA RUMAH YANG LAYAK HUNIBAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI			*) LUAS PERUMAHAN (Ha)	*) JUMLAH RUMAH (UNIT)	*) JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (UNIT RUMAH)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (UNIT RUMAH)	
		KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LINGKUNGAN / DUSUN				*) MBR	*) NON MBR	*) LEGAL	*) ILEGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sempadan Rel KA										
				Total							
2	Daerah Sempadan Sungai										
				Total							
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)										
				Total							
4	Kolong Jembatan										
				Total							

5	Pemukiman Kumuh/Ilegal										
				Total							
6	Daerah Rawan Bencana										
				Total							

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Jenis Program Relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Desa / Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi nama Lingkungan / Dusun
- Kolom 6 : Diisi dengan luas perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektar (Ha)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah rumah yang pendapatan KK dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMR
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah rumah yang pendapatan KK dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah UMR (non-MBR), yaitu lebih besar dari UMR Provinsi
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah Ilegal
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah legal
- *) : Kolom 6-12 adalah total masing-masing dari data rumah

**4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DIATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PEMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI BAGAI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LOKASI			*) LUAS LAHAN (HA)	*) JUMLAH RUMAH (UNIT)	*) JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (UNIT RUMAH)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (UNIT RUMAH)	
	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LINGKUNGAN / DUSUN				*) MBR	*) NON MBR	*) LEGAL	*) ILEGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LALABATA			0	0	0	0	0	0	0
	LILIRILAU			0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Desa / Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi nama Lingkungan / Dusun
- Kolom 5 : Diisi dengan luas lahan bukan fungsi pemukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektar (Ha)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi pemukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dilahan bukan fungsi pemukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah rumah yang pendapatan KK dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMR
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah rumah yang pendapatan KK dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah UMR (non-MBR), yaitu lebih besar dari UMR Provinsi
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah Ilegal
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah legal
- *) : Kolom 5-11 adalah total masing-masing dari data rumah

**4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DIKAWASAN KUMUH KABUPAEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LOKASI			LUAS LAHAN (HA)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN			KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSUN/ LINGKUNGAN				RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Total:	0	0	0	0	0	0	

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Desa / Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi nama Lingkungan / Dusun
- Kolom 5 : Diisi luas lahan kawasan kumuh < 10 Ha dalam satuan Hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada dikawasan kumuh < 10 Ha
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh < 10 Ha
- Kolom 8 : Diisi "ringan" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
- Kolom 9 : Diisi "sedang" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
- Kolom 10 : Diisi "berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
- Kolom 11 : Diisi keterangan
- *) : Total adalah jumlah keseluruhan

**4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI TERKENA RELOKASI**

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LINGKUNGAN/ DUSUN	RT	RW	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMI LIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
										MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Sempadan Rel KA																
				Total													
2	Daerah Sempadan Sungai																
				Total													
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)																
				Total													
4	Kolong Jembatan																

**4.B.3 PERHITUNGAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGAI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN KEJADIAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSUN/ LINGKUNGAN	RW	RT	ALAMAT RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
												MBR	NON MBR	RINGAN	SEDANG	BERAT	MILIK SENDIRI	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	BANGUN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	BANJIR		LALABATA								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN TOPAN		LALABATA								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KEBAKARAN HUTAN		LALABATA								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**4.B.4 PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Pengumpulan data		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Identifikasi rumah dilokasin bencana	Survei sekunder 1 Data wilayah administrasi penanganan 2 identifikasi melalui citra satelit Survei primer 1 Pemetaan	Rp - Rp -	Rp (subtotal) orang*hari orang*hari Rp (subtotal) orang*hari
	2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai relokasi perumahan	Survei sekunder 1 Data aset lahan PEMDA 2 Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW Survei primer 1 Pemetaan	Rp - Rp -	Rp (subtotal) orang*hari orang*hari Rp (subtotal) orang*hari
	3 Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum ditangani	Pendataan rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum ditangani	Rp -	Rp (subtotal)
	4 Pendataan rumah sewa	Survei primer	Rp -	Rp (subtotal)
B	Sosialisasi		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana	Transportasi Komsumsi rapat		orang*hari orang*hari

		Pengadaan Materi Pelatihan ATK Narasumber		Eks LS orang*kali
C	Pembentukan Tim Satgas		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Pelatihan Tim Satgas	Diklat Transportasi Komsumsi rapat Pengadaan Materi Pelatihan ATK Pelatih/Praktisi		orang*hari orang*hari orang*hari Eks LS orang*kali
D	Pendataan cepat		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Pengisian form A dan B	Surveyor Pengadaan form Pengolahan data		orang*hari Eks orang*hari
E	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Rembug warga untuk menentukan calon penerima layanan SPM	Konsumsi rapat Transportasi Pengadaan Materi Pelatihan		orang*kali orang*kali Eks
F	Penyusunan rencana aksi		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati penerimaan dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat Transportasi Pengadaan Materi Pelatihan ATK		orang*kali orang*kali Eks LS
G	Rehabilitasi Rumah		Rp -	Rp (subtotal)
	1 Pembentukan Tim Pendamping Fasilitator	Tenaga ahli Sipil/Arsitektur		orang*bulan
	2 Pelatihan Fasilitator	Konsumsi rapat Pelatih/Praktisi		orang*kali orang*kali

		Transportasi Pengadaan Materi		orang*kali Eks
	3 Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB		Rp
H	Pembangunan kemali		Rp -	
	1 Pembentukan Tim Pendamping Fasilitator	Tenaga ahli Sipil/Aksitektur		orang*bulan
	2 Pelatihan Fasilitator	Konsumsi rapat Pelatih/Praktisi Transportasi Pengadaan Materi		orang*kali orang*kali orang*kali Eks
	3 Penyusunan DED Pemabangunan Kembali Rumah Layak Huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembug Desa 1 Media diskusi 2 Transportasi 3 Konsumsi rapat	Rp -	Rp (subtotal) Rp orang*hari orang*kali
	4 Pembangunan rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB		Rp
I	Pembangunan baru/relokasi korban bencana		Rp	Rp (subtotal)
	1 Pengadaan lahan	Pembebasan lahan		Rp
	2 Penyusunan Site Plan dan DED Rumah Bersama penerima pelayanan fasilitas penyedia rumah layak huni	Rembug warga 1 Media diskusi 2 Transportasi 3 Konsumsi rapat		Rp (subtotal) Rp orang*kali orang*kali
		Tenaga ahli 1 Tenaga ahli perencana 2 Tenaga ahli arsitektur 3 Tenaga ahli teknik sipil		Rp (subtotal) orang*bulan orang*bulan orang*bulan

		4 Tenaga ahli ME		orang*bulan
		5 Tenaga ahli plumbing		orang*bulan
	3 Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB		Rp
J	Penyusunan pelaksanaan laporan SPM 1 Penyusunan pelaporan pelaksanaan SPM		Rp -	Rp (subtotal)
		Pembahasan (paket meeting) Transportasi Praktisi/Narasumber Penggandaan dokumen laporan		orang*kali orang*kali orang*kali Eks
K	Pembinaan penerapan SPM 1 Pembinaan SPM kepada pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota		Rp -	Rp (subtotal)
		Pembahasan (paket meeting) Transportasi Praktisi/Narasumber Penggandaan dokumen laporan		orang*kali orang*kali orang*kali Eks
L	Pemantauan penerapan SPM 1 Perangkat Pemantauan SPM 2 Pemantauan kinerja penerapan SPM		Rp -	Rp (subtotal)
		Pengadaan sistem informasi Operator pelaksana update kinerja Survey lapangan		Rp orang*kali orang*kali
M	Evaluasi penerapan SPM 1 Rapat evaluasi penerapan SPM			
		Pembahasan (paket meeting) Transportasi Praktisi/Narasumber Penggandaan dokumen laporan		orang*kali orang*kali orang*kali Eks

**4.B.7 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LINGKUNGAN / DUSUN	RT	RW	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Sempadan Rel KA																	
				Total														
2	Daerah Sempadan Sungai																	
				Total														
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)																	

				Total															
4	Kolong Jembatan																		
				Total															
5	Pemukiman Kumuh/Illegal																		
				Total															
6	Daerah Rawan Bencana																		
				Total															
6	Daerah Lahan Buka Fungsi Pemukiman																		
				Total															

Keterangan

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut
Kolom 2	Diisi Jenis Program Relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3	Diisi nama kecamatan
Kolom 4	Diisi nama Desa / Kelurahan
Kolom 5	Diisi nama Lingkungan / Dusun
Kolom 6	Diisi dengan RT
Kolom 7	Diisi dengan RW
Kolom 8	Diisi nama KK (bila dalam satu rumah terdapat dua atau lebih KK cukup diisi satu KK yang didata)
Kolom 9	Diisi NIK KK
Kolom 10	Diisi jumlah seluruh anggota keluarga dalam satu rumah
Kolom 11	Diisi angka 1 bila pendapatan kepala keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yani lebih kecil dari upah minimal regional provinsi (UMR)
Kolom 12	Diisi angka 1 bila pendapatan kepala keluarga termasuk dalam kategori Non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Non MBR), yani lebih besar sama dengan dari upah minimal regional provinsi (UMR)
Kolom 13	Diisi dengan luas bangunan dalam satuan M ³
Kolom 14	Diisi dengan luas tanah dalam satuan M ³
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah legal dengan bukti kepemilikan (sertifikat/akta jual beli)
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah yang status tanah Ilegal
Kolom 17	Diisi dengan jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 18	Diisi dengan jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 19	Diisi dengan jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan rumah layak huni

**4.B.8 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengumpulan data			Rp (Sub Total)
	1 Pendataan perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer Pengambilan data lapangan		Rp Orang*Hari
	2 Pendataan perumahan diatas lahan bukan fungsi pemukiman	Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer Pengambilan data lapangan		Rp Orang*Hari
	3 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun umum dan/atau rumah khusus eksisting	Survey sekunder Koordinasi dengan instansi terkait PTSP Survey primer Pengambilan data lapangan		Rp Orang*Hari
	4 Pengelolaan data	Tenaga pengelola data Tenaga ahli geografi/geodesi tenaga ahli statistik		Orang*Bln Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan an Kawasan Pemukiman dalam dokumen RKPD Kabupaten/Kota			
	1 Rapat Kordinasi dengan Bappeda dan OPD lain terkaiat program pemerintah yang berdampak pada relokasi pemukiman masyarakat	Koordinasi sinkronisasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Paket meeting		Rp (Sub Total) Orang*Kali
	2 Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket meeting		Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi Program Pemerintah daerah Kab/Kota			
	1 Sosialisasi tentang Program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan sosialisasi Pengadaan media publikasi (leaflet / booklet) Transportasi Komsumsi		Eks Orang*Hari Orang*Kali
	2 Sosialisasi tentang pelayanan SPM	Penyelenggaraan sosialisasi Pengadaan media publikasi (leaflet / booklet) Transportasi Komsumsi		Eks Orang*Hari Orang*Kali
4	Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota			Rp (Sub Total)

	1	Identifikasi calon penerima layanan dan pilihan layanan SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan identifikasi Penggadaan formulis ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rekrut warga Media diskusi Transportasi Konsumsi Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen	Eks Orang*Hari Orang*Kali Eks
5		Fasilitasi penggantian atas tanah dan/atau bangunan		Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima fasilitas pelayanan penggantian atas tanah dan/atau bangunan	Penyelenggaraan verifikasi Penggadaan formulis ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan	Penyelenggaraan sosialisasi Pengadaan media publikasi (leaflet / booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
	3	Pendampingan teknis perhitungan apresial asset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan apresial asset properti Tenaga ahli jasa apresial Transportasi Konsumsi	Orang*Bln Orang*Hari Orang*Kali
	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan sosialisasi Pengadaan media publikasi (leaflet / booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
6		Subsidi uang sewa		Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima layanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan verifikasi Penggadaan formulis ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni Konsumsi	Orang*Kali
	3	Penyaluran subsidi uang sewa	Penyaluran subsidi uang sewa Total uang subsidi sewa Pengadaan dokumen	Rp Eks
7		Fasilitas penyedia rumah layak huni		Rp (Sub Total)

	1	Verifikasi penerima pelayanan penyedia rumah layak huni	Penyelenggaraan verifikasi Pengadaaan formulis ATK Transportasi Konsumsi		Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2	Penyusunan rencana tapak dan DED rumah susun umum dan/atau rumah khusus beserta PSU	Renbug warga Media diskusi Transportasi Konsumsi Tenaga ahli Tenaga ahli Perencana Tenaga ahli arsitektur Tenaga ahli tehnik sipil Tenaga ahli ME Tenaga ahli plumbing		Rp Orang*Hari Orang*Kali Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln
	3	Perjanjian pemanfaatan rumah susun umum atau rumah khusus	Renbug warga Media diskusi Transportasi Konsumsi		Rp Orang*Hari Orang*Kali
	4	Pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah khusus beserta PSU	Pembangunan fisik rumah susun dan/atau rumah khusus Biaya konstruksi Biaya MK		Rp Rp
	5	Penghuni rumah susun dan/atau rumah khusus	Pemanfaatan dan pengelolaan rumah Pemeliharaan bangunan dan lingkungan Pengadaan dokumen		BOP*Bln Eks
8		Pelaporan penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Penyusunan pelaporan SPM	Pembahasan (paket meeting) Pengadaan dokumen		Orang*Kali Eks
9		Pembinaan penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/kota, sektor swasta dan masyarakat	Penyelenggaraan pembinaan Pembahasan (paket meeting) Pengadaan dokumen Praktisi/nara sumber		Orang*Kali Eks Orang*Kali
10		Pemantauan penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Perangkat pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi		Rp
	2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana ubdate data Survei lapangan		Orang*Kali Orang*Kali
11		Evaluasi penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting) Penggandaan materi Narasumber		Orang*Kali Eks Orang*Kali

**RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA (Rp)	SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)									
				TAHUN PERTAMA			TAHUN KEDUA			TAHUN KETIGA			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a Pengadaan lahan												
	b Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
	jumlah*)												

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan kegiatan layanan sesuai dengan form B.3 kolom 21 s.d 24
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 : Disini dengan sumber pembiayaan yang bersumber APBD Tahun Pertama
Kolom 6 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber DAK Tahun Pertama
Kolom 7 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber dari yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun Pertama
Kolom 8 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber APBD Tahun Kedua
Kolom 9 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber DAK Tahun Kedua
Kolom 10 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber dari yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun Kedua
Kolom 11 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber APBD Tahun Ketiga
Kolom 12 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber DAK Tahun Ketiga
Kolom 13 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber dari yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun Ketiga
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data kolom tersebut

**RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA (Rp)	SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi					
2	Pembangunan kembali					
3	Penyediaan rumah relokasi					
	a Pengadaan lahan					
	b Pembangunan baru					
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana					
	jumlah*)					

Keterangan

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan kegiatan layanan

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber APBD pada Tahun N+1

Kolom 6 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber DAK pada Tahun N+1

Kolom 7 : Disin dengan sumber pembiayaan yang bersumber dari yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun N+1

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data kolom tersebut

**RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN KEJADIAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TINGKAT KERUSAKAN				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RINGAN (Unit)	SEDANG (Unit)	BERAT (Unit)	REHABILITASI	BANGUN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	BANGUN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BANJIR																
2	ANGIN TOPAN																
3	KEBAKARAN HUTAN																
4	KEKERINGAN																

**RINCIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIA RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TARGET				REALISASI				
				TOTAL (Unit Rumah)	GANTI ASET (Unit Rumah)	SUBSIDI SEWA (Unit Rumah)	PENYEDIAAN RLH (Unit Rumah)	TOTAL (Unit Rumah)	GANTI ASET (Unit Rumah)	SUBSIDI SEWA (Unit Rumah)	PENYEDIAAN RLH (Unit Rumah)	BELUM TERLAYANI (Unit Rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Sempadan Rel KA											
			total*)									
			Persentase Layanan **)									
			Capaian SPM ***)									
2	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Daerah Sempadan Sungai											
			total*)									
			Persentase Layanan **)									
			Capaian SPM ***)									
3	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)											
			total*)									

			Persentase Layanan **)																	
			Capaian SPM ***)																	
4	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Kolong Jembatan																			
			total*)																	
			Persentase Layanan **)																	
			Capaian SPM ***)																	
5	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Pemukiman Kumuh/Ilega																			
			total*)																	
			Persentase Layanan **)																	
			Capaian SPM ***)																	
6	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Daerah Rawan Bencana																			
			total*)																	
			Persentase Layanan **)																	
			Capaian SPM ***)																	
7	Relokasi perumahan yang membuat bahaya - Daerah Lahan Bukan Fungsi Pemukiman																			
			total*)																	
			Persentase Layanan **)																	
			Capaian SPM ***)																	
			Total Keseluruhan (1+2+3+4+5+6+7) *)																	
			Persentase Layanan **)																	

**CAPAI TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

JENIS LAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PALAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE PENCAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				
penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah				
Keterangan				

- Kolom 1 : Jenis layanan dasar sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2018 (tidak perlu diisi)
- Kolom 2 : Diisi dengan total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai degan kolom pelayanan
- Kolom 3 : Diisi dengan total jumlah rumah yang sudah terlayanani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai degan kolom pelayanan
- Kolom 4 : Diisi dengan total jumlah rumah yang belum terlayanani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai degan kolom pelayanan
- Kolom 5 : Diisi dengan total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total jumlah target rumah pelayanan SPM (kolom 2) di bagi 100

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

- FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PENYUSUNAN SOP
- FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
- FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA
DAN PRASARANA SATPOL PP
- FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN
KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA
DAMPAK
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR TRANTIBUM
- FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB
URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA
PENDANAAN KABUPATEN/KOTA
- FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN/KOTA
- FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN/KOTA
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
TRANTIBUM
- FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM,
FASOS DAN ASET WARGA NEGARA
KABUPATEN/KOTA
- FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN/
KOTA
- FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
PERSONIL SATPOL PP KABUPATEN/
KOTA
- E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)
- FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB
URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

**5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

*Sumber Data : Data Dinas Dukcapil Kab/kota

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi Nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama warga

Kolom 3 : Diisi NIK

Kolom 4 : Diisi nomor KK

Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga

Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga

Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

Kolom 8 : Diisi desa/kelurahan

Kolom 9 : Diisi Kecamatan

**5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

KETERANGAN :

kolom 1 : Diisi nomor urut

kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri nomor 54 tahun 2011

kolom 3 : Diisi SOP kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri nomor 54 tahun 2011

kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada

kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian usulan yang ada pada tiap kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

**5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			LAYAK	TIDAK LAYAK
1	2	3	4	5

* Sumber data bersumber dari Satpol PP

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi jenis sarana prasarana
- Kolom 3 : Diisi Jumlah sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi Kondisi sarana Prasarana apabila layak
- Kolom 5 : Diisi Kondisi sarana Prasarana apabila tidak layak

**5.A.5 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS		JUMLAH
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS	
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum						0
							0
							0
							0
							0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang trantibum sesuai dengan peraturran pemerintah nomor 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah PNS satpol yang belum mengikuti dan lulus diklat dasar pol pp
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS satpol yang sudah mengikuti dan lulus diklat dasar pol pp
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah peronil satpol pp non PNS
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah personil PPNS pada satpol pp
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota satlinmas yang di perbantukan dalam penegakan pemda dan perkara
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah keseluruhan petugas tiap jenis pelayanan

**5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA		JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DI TEGAKKAN		KETERANGAN
		NOMOR	TENTANG	PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum					
			TOTAL			

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomro urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor perda/perkada yang ditegakkan yang memuat sanksi
- Kolom 4 : Diisi dengan tentang judul perda/perkada yang memuat sanksi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah perda dan perkada keseluruhan
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah perda yang akan ditegakkan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah perkada yang akan di tegakkan
- Kolom 8 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

**5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDANPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0-50 METER
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	7			

* Sumber data : data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh satpol pp

** Data perlu di verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara
- Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera ringan
- Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER KABUPATEN SOPPENG TAHUN

NO	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber data : data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu di verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan

Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang

Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

**5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	kebutuhan penyusunan SOP			
2		kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (satpol PP,PPNS,dan Satlinmas)			
3		kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana satpol pp			
4		pelayanan perbaikan materil			
5		pelayanan pengobatan			
6		kebuthan lainnya			

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan kebutuhan sesuai dengan mutu pelayanan
- Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format penghitungan kebutuhan masing-masing
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

5.B2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP
SUB URUSAN TRANTIBUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN

NO	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang di butuhkan

**5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP,PPNS,SATLINMAS
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah pelayanan dasar bidang trantibum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan PNS satpol PP yang mengikuti Diklat dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan PNS dan non PNS satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan perjenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih di butuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah biaya satuan anggota satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota satlinmas

**5.B.4 PEGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana prasarana
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana prasarana
- Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

**5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*Sumber data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh satpol PP

*Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data exisiting

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Penerimaan layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/ atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/ atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan ase warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan program kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan program kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan program kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS, DAN ASET WARGA
NEGARA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
		JUMLAH									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
		JUMLAH									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisii dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
		JUMLAH									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan perda/perkada
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penegkan perda/perkadayang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda/perkada yang berhak mendapat layanan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda/perkada yang terlayani
- Kolom 8 : Diisi capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka kolom 7 di bagi dengan jumlah angka kolom 6 di kalikan 100)
- Kolom 9 : Diisi capaian jumlah penegakan perda / perkada sesuai mutu pada kolom 5 di tambah dengan capaian pelayan ganti rugi pada kolom 8 di bagi 2 (dua) dikalikan 100
- Kolom 10 : Kategori sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

**2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM
KEBAKARAN (DAMKAR)**

- A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR
 - FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR
KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG
MENJADI KORBAN KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA
- B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR DAMKAR
 - FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME
PENANGGULANGAN KEJADIAN
KEBAKARAN 15 MENIT
 - FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
 - FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
 - FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT/ RELAWAN KEBAKARAN
 - FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN
INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR DAMKAR
 - FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN
DASAR
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR
 - FORM 5.D.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR
 - FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR (OPERASI NON
KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA
- E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)
 - FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan
- Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka
- Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 : Diisi dengan angka
- Kolom 17 : Diisi dengan angka
- Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 19 : Diisi dengan angka
- Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 21 : Diisi dengan angka
- Kolom 22, 23, 24, 25, 26, 27 : Diisi dengan angka

**5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA	L/K	TANGGAL LAHIR	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi no urut
- Kolom 2 : Diisi nama
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi tanggal lahir
- Kolom 5 : Diisi angka yang menunjukkan usia
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : Bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi
- Kolom 7 : Diisi alamat lokasi relawan

5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT	KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	KORBAN MENINGGAL DUNIA	KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DI SELAMATKAN	TAKSIRAN KERUGIAN ASET	
		L	P	0-5 Tahun	6-18 tahun	19-30 tahun	31-60 tahun	> 60	Sehat	Berkebutuhan Khusus												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<i>Total</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	
	<i>Total keseluruhan</i>	0		0	0	0	0	0														

KETERANGAN :

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut
Kolom 2	Diisi dengan nama
Kolom 3-4	Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 5-9	Diisi dengan usia
Kolom 10	Diisi dengan angka "1" dengan kondisi fisik sehat dan diisi dengan angka "0" dengan kondisi fisik berkebutuhan khusus
Kolom 11	Diisi dengan angka "1" dengan kondisi fisik berkebutuhan khusus dan diisi dengan angka "0" dengan kondisi fisik sehat
Kolom 12	Diisi dengan NIK
Kolom 13	Diisi dengan KK
Kolom 14	Diisi dengan tempat lahir
Kolom 15	Diisi dengan tanggal lahir
Kolom 16	Diisi dengan alamat
Kolom 17	Diisi dengan angka "1" bila korban terselamatkan
Kolom 18	Diisi dengan angka "1" bila korban meninggal dunia
Kolom 19	Diisi dengan angka "1" bila korban mengalami luka bakar
Kolom 20	Diisi dengan angka "1" bila korban mengalami luka fisik lainnya
Kolom 21	Diisi dengan angka "RP" taksiran
Kolom 22	Diisi dengan angka "RP" taksiran

**LAYANAN RESPONS TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAAYA YANG DI BUTUHKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	pengadaan alat komunikasi	1. belanja alat komunikasi HT	A. jumlah komandan lapangan		$(A * C) + (B * C)$	
			B. jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran			
			C. harga unit perjenis			
		2. Kesiapan sarana Pusdalops Damkar	A. jumlah rig di pusdalops		$(A * D) + (B * D) + (C * D)$	
			B. jumlah perangkat komputer			
			C. jumlah soung sistem/ sirene toa			
			D. Harga unit per jenis			
2	penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	1. nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. jumlah server		$(A * C) + (B * C)$	
			B. jumlah perangkat komputer			
			C. harga unit perjenis			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : adalah penghitungan dari kolom 4

Kolom 7 : diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

**5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DI BUTUHKAN	
1	2	3	4	6	7	
1	penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1. penyediaan mobil damkar/ kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A.	jumlah sektor/pos	A*B*C	
			B.	jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar		
			C.	harga satu unit		
		2. Pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A.	jumlah unit mobil damkar/ unit operasional damkar lainnya	A*B*C	
			B.	jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya		
			C.	harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya		
		3. pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unitoperasional damkar lainnya	A.	jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	(A*B)*C	
			B.	jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya		
			C.	harga perliter bahan bakar		
		4. pendidikan dan pelatihan petugas pemadaman kebakaran	A.	jumlah petugas	(A*B)*C	
			B.	jumlah pelatihan		
			C.	biaya per pelatihan		
2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kebakaran	1. penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A.	jumlah/jenis/set/paket/ unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A*B	
			B.	harga perjumlah/jenis / set/ paket/unit		
		2. penyediaan alat perlindungan petugas	A.	jumlah/jenis/set/paket/ unit alat perlindungan diri petugas	A*B	
			B.	harga per jumlah/jenis/ set/paket/unit		

3	penyediaan tandon air/air/bahan untuk pemadaman	1.	penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A.	jumlah/volume tandon air/air/foam untuk pemadaman	A*B	
				B.	harga per jumlah jumlah/volume		
		2.	pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A.	jumlah unit tandon air	(A*B)*C	
				B.	jumlah pemeliharaan unit tandon air dalam satu tahun		
				C.	harga biaya pemeliharaan tandon air per unit		
		4	kesiap siagaan petugas pemadam kebakaran	1.	kesiapsiagaan petugas damkar	A.	jumlah petugas pemadaman kebakaran
B.	honorarium piket jaga						
2.	pelaksanaan pemadaman kebakaran			A.	jumlah petugas pemadaman kebakaran	A*B	
				B.	honorarium per kejadian kebakaran		

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil perhitungan rumus pada kolom 6

**5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah pos sektor/pos damkar		A*B*C	
			B jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)			
			C harga satu unit			
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan			
			C harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue)			
		3. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue)			
			C harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	1. penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A jumlah/ jenis/ set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)		A*B	
			B harga per jumlah / jenis/ set/ paket/ unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. kesiapsiagaan petugas penyelamatan (rescue)	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		A*B	
			B honorarium piket jaga			
		2. pelaksanaan penyelamatan (rescue)	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		A*B	
			B honorarium per kegiatan penyelamatan			
		3. pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah pelatihan			
C biaya per pelatihan						

KETERANGAN :

- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus
- Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus kolom 6

**5.B. LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	sosialisasi masyarakat	A frekuensi kegiatan sosialisasi		A*B	
			B biaya penyelenggaraan persosialisasi			
2	pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	pelatihan/ simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan penyuluhan		A*B	
			B biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan			
3	pembentukan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKI)	pembentukan satuan relawan kebakaran	A jumlah satlakar		A*B	
			B biaya paket pelatihan/simulasi			
		penyediaan sarana satlakar	A jumlah satlakar		(A*B)*C	
			B jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar			
			C harga per jumlah/urut/jenis paket			
		pembinaan operasional satlakar	A jumlah satlakar		A*B	
B biaya per kegiatan satlakar						

KETERANGAN :

- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus
- Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

**5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1 penyediaa tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A Jenis tenaga ahli		$((A*B*C*D) + (E*F))$	
			B jenis potensi resiko			
			C jumlah orang			
			D jumlah bulan kerja			
			E jumlah pertemuan			
			F atk dan penggandaan laporan			
		2 penyediaa tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A Jenis tenaga ahli		$((A*B*C) + (D*E))$	
			B jumlah orang			
			C jumlah bulan kerja			
			D jumlah pertemuan			
			E atk dan penggandaan laporan			
		3 penyediaa tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A Jenis tenaga ahli		$((A*B*C) + (D*E))$	
			B jumlah orang			
			C jumlah bulan kerja			
			D jumlah pertemuan			
			E atk dan penggandaan laporan			
		4 diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan di tetapkan menjadi dokumen yang sah/ legal	A penyediaa tempat dan meja, kursi serta sound system		$((A+B+C) + ((D+E)*F) + ((D+G)*H) + I)$	
			B penyediaa peralatan pendukung			
			C penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D akomodasi dan konsumsi			
E Transport peserta						
F jumlah peserta						
G Honor tenaga ahli						
H jumlah tenaga ahli laporan						
I laporan						
5 pelaporan kejadian kebakaran	A frekuensi pendataan kejadian kebakaran		$(A*B*C) + D$			
	B jumlah petugas pendataan					
	C honorarium petugas pendataan					
	D biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan					
2	Inspeksi	1 Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B jumlah petugas			
			C biaya perkegiatan			

		2 inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A jumlah bangunan gedung		(A*B)*C			
			B jumlah petugas					
			C biaya perkegiatan					
		3 pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi			A jumlah petugas		(A*B)*C	
					B jumlah pelatihan			
					C biaya perkegiatan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4 inventarisasi kejadian kebakaran	A jumlah petugas		(A*B)*C			
			B jumlah sarana dan prasarana pendukung					
			C biaya perkegiatan					
		5 investigasi penyebab kebakaran			A jumlah petugas		A*B*C*D	
B frekuensi investigasi								
C jumlah sarana pendukung								
D biaya perkegiatan investigasi								

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN :

- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 Diisi dengan program kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 4 Diisi dengan kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 5 Diisi dengan sub kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahiran sesuai dengan kepmendagri nomor 05-3708 tahun 2020
- Kolom 6 Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan program kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan program kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan yang di sesuaikan permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran dari sub kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS, DAN ASET WARGA NEGARA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi deNgan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisii dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisii dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

KETERANGAN :

- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 Diisi dengan jumlah target perjenis keluaran (output)
- Kolom 5 Diisi dengan jumlah target anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 6 Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 Diisii dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 8 Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian keuangan perjenis keluaran (output)
- Kolom 10 Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan perda/perkada
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penegakan perda/perkadayang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda/perkada yang berhak mendapat layanan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan perda/perkada yang terlayani
- Kolom 8 : Diisi capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka kolom 7 di bagi dengan jumlah angka kolom 6 di kalikan 100)
- Kolom 9 : Diisi capaian jumlah penegakan perda / perkada sesuai mutu pada kolom 5 di tambah dengan capaian pelayan ganti rugi pada kolom 8 di bagi 2 (dua) dikalikan 100
- Kolom 10 : Kategori sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

**DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO.	PROVINSI KABUPATEN / KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS				JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN						
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TIPE					MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFI KASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFI KASI	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	SOPPENG																									
						jumlah																				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan
- Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka
- Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 : Diisi dengan angka
- Kolom 17 : Diisi dengan angka
- Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 19 : Diisi dengan angka
- Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 21 : Diisi dengan angka
- Kolom 22, 23, 24, 25, 26, 27 : Diisi dengan angka

**5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA	L/K	TANGGAL LAHIR	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi no urut
- Kolom 2 : Diisi nama
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi tanggal lahir
- Kolom 5 : Diisi angka yang menunjukkan usia
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : Bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi
- Kolom 7 : Diisi alamat lokasi relawan

**5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT	KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	KORBAN MENINGGAL DUNIA	KORBAN MENGA LAMI LUKA BAKAR	KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DI SELAMATKAN	TAKSIRAN KERUGIAN ASET
		L	P	0-5 Tahun	6-18 tahun	19-30 tahun	31-60 tahun	> 60	Sehat	Berkebutuhan Khusus											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Total	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0
	Total keseluruhan	0		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 4 s.d 9 : Diisi dengan usia
- Kolom 10 : Diisi dengan angka "1" dengan kondisi fisik sehat dan diisi dengan angka "0" dengan kondisi fisik berkebutuhan khusus
- Kolom 11 : Diisi dengan angka "1" dengan kondisi fisik berkebutuhan khusus dan diisi dengan angka "0" dengan kondisi fisik sehat
- Kolom 12 : Diisi dengan NIK
- Kolom 13 : Diisi dengan KK
- Kolom 14 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 15 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 16 : Diisi dengan alamat
- Kolom 17 : Diisi dengan angka "1" bila korban terselamatkan
- Kolom 18 : Diisi dengan angka "1" bila korban meninggal dunia
- Kolom 19 : Diisi dengan angka "1" bila korban mengalami luka bakar
- Kolom 20 : Diisi dengan angka "1" bila korban mengalami luka fisik lainnya
- Kolom 21 : Diisi dengan angka "RP" taksiran
- Kolom 22 : Diisi dengan angka "RP" taksiran

**LAYANAN RESPONS TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DI BUTUHKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	pengadaan alat komunikasi	1. belanja alat komunikasi HT	A. jumlah komandan lapangan		$(A * C) + (B * C)$	
			B. jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran			
			C. harga unit perjenis			
		2. Kesiapan sarana Pusdalops Damkar	A. jumlah rig di pusdalops		$(A * D) + (B * D) + (C * D)$	
			B. jumlah perangkat komputer			
			C. jumlah soung sistem/ sirene toa			
			D. Harga unit per jenis			
		2	penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	1. nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. jumlah server	
B. jumlah perangkat komputer						
C. harga unit perjenis						

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : adalah penghitungan dari kolom 4

Kolom 7 : diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

**5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DI BUTUHKAN		
1	2	3	4	5	6	7		
1	penyediaan mobil mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1. penyediaan mobil damkar/ kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. jumlah sektor/pos		A*B*C			
			B. jumlah unit mobil per pos sektor/pos domkar					
			C. harga satu unit					
		2. Pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. jumlah unit mobil damkar/ unit operasional damkar lainnya		A*B*C			
			B. jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal dakar/ unit operasional damkar lainnya					
			C. harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya					
		3. pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unitoperasional damkar lainnya	A. jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		(A*B)*C			
			B. jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/ unit operasional damkar lainnya					
			C. harga perliter bahan bakar					
		2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kebakaran	4. pendidikan dan pelatihan petugas pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas		(A*B)*C	
					B. jumlah pelatihan			
					C. biaya per pelatihan			
1. penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. jumlah/jenis/set/ paket/ unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran				A*B			
	B. harga perjumlah/jenis/ set/ paket/unit							
2. penyediaan alat perlindungan petugas	A. jumlah/jenis/set/ paket/ unit alat perlindungan diri petugas		A*B					
	B. harga per jumlah/jenis/ set/paket/unit							

3	penyediaan tandon air/air/bahan untuk pemadaman	1. penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A.	jumlah/volume tandon air/air/foam untuk pemadaman	A*B	
			B.	harga per jumlah jumlah/ volume		
		2. pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A.	jumlah unit tandon air	(A*B)*C	
			B.	jumlah pemeliharaan unit tandon air dalam satu tahun		
			C.	harga biaya pemeliharaan tandon air per unit		
		4	kesiap siagaan petugas pemadam kebakaran	1. kesiapsiagaan petugas damkar	A.	jumlah petugas pemadaman kebakaran
B.	honorarium piket jaga					
2. pelaksanaan pemadaman kebakaran	A.			jumlah petugas pemadaman kebakaran	A*B	
	B.			honorarium per kejadian kebakaran		

KETERANGAN :

Kolom 5 Diisi dengan angka

Kolom 6 Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 Diisi dengan angka hasil perhitungan rumus pada kolom 6

5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah pos sektor/pos damkar		A*B*C	
			B jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)			
			C harga satu unit			
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan			
			C harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue)			
		3. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue)	A jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue)			
			C harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	1. penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A jumlah/ jenis/ set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)		A*B	
			B harga per jumlah / jenis/ set/ paket/ unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. kesiapsiagaan petugas penyelamatan (rescue)	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		A*B	
			B honorarium piket jaga			
		2. pelaksanaan penyelamatan (rescue)	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		A*B	
			B honorarium per kegiatan penyelamatan			
		3. pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A jumlah petugas penyelamatan (rescue)		(A*B)*C	
			B jumlah pelatihan			
C biaya per pelatihan						

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus kolom 6

**5.B. LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	sosialisasi masyarakat	A frekuensi kegiatan sosialisasi		A*B	
			B biaya penyelenggaraan persosialisasi			
2	pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	pelatihan/ simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan penyuluhan		A*B	
			B biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan			
3	pembentukan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKI)	pembentukan satuan relawan kebakaran	A jumlah satlakar		A*B	
			B biaya paket pelatihan/simulasi			
		penyediaan sarana satlakar	A jumlah satlakar		(A*B)*C	
			B jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar			
			C harga per jumlah/urut/jenis paket			
		pembinaan operasional satlakar	A jumlah satlakar		A*B	
B biaya per kegiatan satlakar						

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

**5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1 penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A Jenis tenaga ahli		((A*B*C*D)+(E*F))	
			B jenis potensi resiko			
			C jumlah orang			
			D jumlah bulan kerja			
			E jumlah pertemuan			
			F atk dan penggandaan laporan			
		2 penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A Jenis tenaga ahli		((A*B*C)+(D*E))	
			B jumlah orang			
			C jumlah bulan kerja			
			D jumlah pertemuan			
			E atk dan penggandaan laporan			
		3 penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A Jenis tenaga ahli		((A*B*C)+(D*E))	
			B jumlah orang			
			C jumlah bulan kerja			
			D jumlah pertemuan			
			E atk dan penggandaan laporan			
		4 diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan di tetapkan menjadi dokumen yang sah/ legal	A penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system		((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+I)	
			B penyediaan peralatan pendukung			
			C penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D akomodasi dan konsumsi			
E Transport peserta						
F jumlah peserta						
G Honor tenaga ahli						
H jumlah tenaga ahli laporan						
I laporan						
	5 pelaporan kejadian kebakaran	A frekuensi pendataan kejadian kebakaran		(A*B*C)+D		
		B jumlah petugas pendataan				
		C honorarium petugas pendataan				

			D biaya belanja bahan/atk peyusunan laporan			
2	Inspeksi	1 Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A jumlah bangunan gedung		(A*B)* C	
			B jumlah petugas			
			C biaya perkegiatan			
		2 inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A jumlah bangunan gedung	0	(A*B)* C	
			B jumlah petugas			
			C biaya perkegiatan			
		3 pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi	A jumlah petugas		(A*B)* C	
			B jumlah pelatihan			
			C biaya perkegiatan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4 inventarisasi kejadian kebakaran	A jumlah petugas		(A*B)* C	
			B jumlah sarana dan prasarana pendukung			
			C biaya perkegiatan			
		5 investigasi penyebab kebakaran	A jumlah petugas		A*B*C *D	
			B frekuensi investigasi			
			C jumlah sarana pendukung			
			D biaya perkegiatan investigasi			

KETERANGAN :

- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari kolom 4 menggunakan rumus
- Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada kolom 6

**5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kecamatan di kabupaten/kota
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di kabupaten/kota pada tahun pendataan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah di bentuk di kabupaten/kota pada tahun pendataan
- Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya
- Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadaman kebakaran yang akan di bentuk pada tahun berikutnya

**5.D.1.REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/ KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar
- Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh Relawan damkar
- Kolom 5 : Diisi dengan total Jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian di bagi 2

**5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	total								

0

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah ah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan di sebutkan

**5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL PRESENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	KORBAN JIWA					JUMLAH TAKSIRAN ASET	
			JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DI SELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab. Soppeng								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan angka presentase
- Kolom 4 : Diisi dengan angka
- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan angka
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka

3) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA

A. PENGUMPULAN DATA BENCANA

- FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
- FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGAR
- FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
- FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
- FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN
- FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH
- FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
- FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN
- FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT)
PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM
SUB URUSAN BENCANA

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM
SUB URUSAN BENCANA

**5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

DATA DASAR WARGA NEGARA											JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL								NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA				
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NO KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DUSUN/ LINGKUNGAN	RT	RW	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTREM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEMI DAN WABAH	19	WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT
	2	3																						
1	0	0	0	0	0			0	0															
2	0	0	0	0	0			0	0															
3	0	0	0	0	0			0	0															
4	0	0	0	0	0			0	0															
5	0	0	0	0	0			0	0															
6	0	0	0	0	0			0	0															
7	0	0	0	0	0			0	0															
8	0	0	0	0	0			0	0															
9	0	0	0	0	0			0	0															
10	0	0	0	0	0			0	0															
11	0	0	0	0	0			0	0															

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama warga negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form.5.A.1
- Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 4 : Diisi NIK berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 8 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 9 - 18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal warga negara
- kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
- kolom 20 : Di checklist jika warga negara termasuk ke dalam kelompok warga negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
- kolom 21 : Di checklist jika warga negara termasuk ke dalam kelompok aparaturnya yang menangani sub urusan bencana
- kolom 22 : Di checklist jika warga negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

**5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL		
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI N			KK	JIWA	
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =5+8+11	14 =6+9+12	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 7 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 10 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n
- Kolom 14 : Diisi dengan total warga negara pada variasi 1, variasi 2 dan variasi n

**5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)				JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN						KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN			
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan Desa/kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 7 : Diisi dengan umlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah warga negara di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah warga negara (KK) di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah warga negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah warga negarayang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor KK
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat
- Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan tempat tinggal
- Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi
- Kolom 12 : Diisi YA jika memiliki kebutuhan khusus, TIDAK jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab YA
- Kolom 14 : Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
- Kolom 15-20 : Diisi dengan checklist sesuai status petugas
- Kolom 21 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 22-26 : Diisi dengan checklist sesuai penugasan lokasi
- Kolom 27 : Diisi dengan keterangan, jenis keahlian ,DLL

**5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+10
	total									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan permendagri nomo 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan bencana daerah Kab/kota
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada dikawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah KK yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah Desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas tim reaksi cepat (TRC) penanganan darurat bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC kejadian luar biasas (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 di tambah kolom 9)

**5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENANGAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
- Kolom 4-8 : Diisi dengan checklist
- Kolom 9 : Diisi dengan lokasi peralatan
- Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggung jawab peralatan
- Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi peralatan

**5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
- Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
- Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggung jawab barang
- Kolom 6-7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama warga negara
- Kolom 3 : Diisi dengan nik warga negara
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor KK warga negara
- Kolom 5 : Diisi sesuai jenis kelamin
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir warga negara
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir warga negara
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal warga negara
- Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan warga negara
- Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal warga negara
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi warga negara
- Kolom 12 : Diisi dengan angka 1 jika YA dan angka 0 jika TIDAK
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus yang diperlukan
- Kolom 14 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "bayi"
- kolom 15 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "balita"
- Kolom 16 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "anak-anak"
- Kolom 17 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "ibu hamil/ibu menyusui"
- Kolom 18 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "penyandang cacat"
- Kolom 19 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "berkebutuhan khusus"
- Kolom 20 : Diisi angka 1 jika warga negara termasuk dalam kelompok umur rentan "orang lansia"

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor KK warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal warga negara sesuai form.5.A.1
- Kolom 8-18 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK petugas operasi
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor KK petugs operasi
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/kelurahan tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi
- Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....

NO	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DI TERIMA (JAM MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DI KELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN < 24 JAM	DIKELUARKAN > 24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
- Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD
- Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
- Kolom 7 : Diisi dengan chcklist sesuai kondisi

**5.B.1. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB - URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBU TUHAN	KETER SEDIA AN	SELIS IH (+/-)	HARGA SATUA N (x RP.100 0)	KEBUTU HAN BIAAYA (x RP.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT /PETUG AS	DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	¹⁴ =12.13	15	¹⁶ =14 x 15

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah warga negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah KK penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13
- Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran
- Kolom 16 : Diisi sesuai dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kab/kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)
- Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)
- Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
- Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (Rp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (15X16)	18	19	20 (18X19)	21	22	23 (21X22)	24	25	26 (24X25)	27	28	29 (27X28)	30 (15 + 18 + 21 + 24 + 27)	31 (17 + 20 + 23 + 26 + 29)

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan smp sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT / PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			target	Jumlah biaya (xRp.1000)
														target	harga satuan	jumlah biaya (x Rp.1000)	target	harga satuan	jumlah biaya (x Rp.1000)	target	harga satuan	jumlah biaya (x Rp.1000)	target	harga satuan	jumlah biaya (x Rp.1000)	target	harga satuan	jumlah biaya (x Rp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 15X16	18	19	20 = 18X19	21	22	23 = 21 X 22	24	25	26= 24 X 25	27	28	29 = 27 X 28	30 = 15+ 18 +21 + 24+27	31 = 17 + 20 +23 + 26 + 29

KOEFSISIEN PROYEKSI	ORANG	BARANG	HARGA
	1	2	3
KETERANGAN : Kolom 1 : diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan Kolom 2 : Dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan Kolom 3 : diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan			

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomro urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan suber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12
- Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien proyeksi)
- Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuha layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikali kolom 15
- Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)

- Kolom 18 : Diisi dengan proyeksi harga satuan pengeluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 19 : Diisi dengan kolom 17 dikalikan kolom 18
- Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 ddikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 22 : Diisi dengan kolom 20 dikalikan kolom 21
- Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)
- Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikali kolom 24
- Kolom 26 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23
- Kolom 27 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25

**5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI		
							VOLUME	BIAYA (x RP.1000)	VOLUME	BIAYA (x RP.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10/8	13 = 11/9	14	15	16 = $\bar{x}(12+13+14)$	17 = $\Sigma(15x16)$	18 = $\bar{x}(12+14)$	19 = $\Sigma(15x18)$	20	21	22		

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan mosul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten /kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output)sesuai formular 5.C.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran perjenis keluaran (output)
- Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
- Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja SPM berjalan (rata-rata capaian fisik di tambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
- Kolom 18 : Diisi dengan progres capain SPM berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
- Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa di lakukan

5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan diperbarui untuk setiap bencana yang di tetapkan status keadaan darurat)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n								CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGAN	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI										
							TARGET				REALISASI				KOMPONEN INDIKATOR LAYANAN	CAPAIAN %			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)													
							VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (± RP.1000)	VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (± RP.1000)		FISIK	KEUANGAN									MUTU LAYANAN	FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN						
							17 = ((12X13)/(8X9)X16X100%	18 = (15/11)X100%	19	20 = \bar{x} (Capaian Fisik)	21 = \bar{x} (Capaian Keuangan)	22 = \bar{x} (Capaian Mutu Layanan)	23	24 = \bar{x} (20+21+22)		25 = $\Sigma(23X24)$	26 = \bar{x} (20+21)									27 = $\Sigma(23X26)$									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8X9X10	12	13	14	15 = 12X13X14	16	17 = ((12X13)/(8X9)X16X100%	18 = (15/11)X100%	19	20 = \bar{x} (Capaian Fisik)	21 = \bar{x} (Capaian Keuangan)	22 = \bar{x} (Capaian Mutu Layanan)	23	24 = \bar{x} (20+21+22)	25 = $\Sigma(23X24)$	26 = \bar{x} (20+21)	27 = $\Sigma(23X26)$	28	29	30						

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan mosul instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten /kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tergte volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)
- Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan lebih dari 24 jam)
- Kolom 17 : Diisi dengan presentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti terget)
- Kolom 18 : Diisi dengan persente capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah RP realisasi di bagi dengan jumlah RP target)
- Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap tiap komponen
- Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik di tambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
- Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian SPM tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
- Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=4X5X6	8= i / (Σ 7)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1 Penyusunan kajian risiko bencana					
		2 Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4 Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10 Respon cepat darurat bencana					
		11 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					
		JUMLAH					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan
- Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1
- Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1
- Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6
- Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

**5.E 2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	2	3	4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1 Penyusunan kajian risiko bencana	17				
		2 Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana	50				
		4 Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	33				
		10 Respon cepat darurat bencana					
		11 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
- Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

**5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	2	3		4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ 7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana	17			0	
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana				0	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	50			0	
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)				0	
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi				0	
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				0	
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				0	
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				0	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	33			0	
		10	Respon cepat darurat bencana				0	
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				0	
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana				0	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
- Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

- FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS
- FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/ KOMUNITAS)
- FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
- FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS) FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
- FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI
- FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, GELANDANGAN PENGEMIS DALAM PANTI

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

**DATA PENYANDANG DISABILITAS TERNATAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN**

NO	NAMA	NIK	L/P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	TINGGAL DIDALAM KELUARGA	HUBUNGAN KELUARGA DAN KEPALA KELUARGA	NO. KK	TINGGAL DILUAR KELUARGA					STATUS PERKAWINAN			PEKERJAAN / SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETERLANTARAN			DATA FM/OTM			KETERANGAN
											PANTI	TERMINAL	PASAR	JALANAN	DLL	MENIKAH	BELUM	CERAI			KEJURGA/MASYARAKA T TIDAK MEGURUS	RENTANG MANGALAMI KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA TAPI MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN, PERLAKUAN SALAH, EKSPLOITASI DAN	TIDAK	YA	NOMOR KARTU (jika Ya)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Penyandang Disabilitas																										
1																											
Dst																											
Jumlah Total *)											0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
	Anak Terlantar																										
1																											
Dst																											
Jumlah Total *)											0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
	Lanjut Usia Terlantar																										
1																											
Dst																											
Jumlah Total *)											0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
	Gelandangan Pengemis																										
1																											
Dst																											
Jumlah Total *)											0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				

Sumber Data :

1. Hasil Identifikasi DKTS
2. Hasil Veri Valid dan/atau Pendataan dan/atau Veri Valid Dinsos Kab/Kota

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak terlantar/lanjut usia terlantar/Gelandang Pengemis
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
- Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan kelurahan/desa berdomisili
- Kolom 8 : Diisi dengan kecamatan berdomisili
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal dikeluarga (rumah atau tidak)
- Kolom 10 : Diisi dengan hubungan keluarga (kepala keluarga, isteri, anak, nenek, saudara, dsb)
- Kolom 11 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 12 : Diisi dengan angka "1" bila berada di panti
- Kolom 13 : Diisi dengan angka "1" bila berada di terminal
- Kolom 14 : Diisi dengan angka "1" bila berada di pasar
- Kolom 15 : Diisi dengan angka "1" bila berada di jalan
- Kolom 16 : Diisi dengan angka "1" bila berada/tinggal bukan di panti,terminal,pasar atau jalan
- Kolom 17 : Diisi dengan angka "1" bila sudah menikah
- Kolom 18 : Diisi dengan angka "1" bila belum menikah
- Kolom 19 : Diisi dengan angka "1" bila satatus cerai
- Kolom 20 : Diisi jenis pekerjaan/sekolah
- Kolom 21 : Diisi dengan jenis disabilatas bila disabilitas
- Kolom 22 : Diisi dengan angka "1" bila masih ada keluarga namun tidak diurus oleh keluarganya/masyarakat
- Kolom 23 : Diisi dengan angka "1" bila mengalami kerentangan kekerasan di lingkungan masyarakat
- Kolom 24 : Diisi dengan angka "1" bila memiliki kelauarga namun mengalami kerentangan kekerasan dalam keluarga, perilaku salah, eksploitasi dan penelantaran
- Kolom 25 : Diisi dengan angka "1" bila tidak terdaftar di data FM/OTM, bila terdaftar diisi nagk "0"
- Kolom 26 : Diisi dengan angka "1" bila terdaftar di data FM/OTM, bila tidak terdaftarb diisi angka "0"
- Kolom 27 : Diisi nomor kartu data FM/OTM
- Kolom 28 : Diisi dengan keterangan

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama desa/kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan

**REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya
- *) : Total adalah jumlah keseluruhan per setiap kolom

**DATA REKAPITULASI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS				NAMA LEMBAGA/ SARANA PRASARAN TEMPAT KERJA	STATUS SDM		REKRUKMEN DAN PEMBINAAN			KETERANGAN
		PEKSOS	PENSOS	TKS	RELSOS		ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rehabilitas Sosial Dasar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di dalam Panti/Lembaga											
1						- UPTD Sosial (Panti Sosial/Penyandang Disabilitas)						
2												
3												
4						- Panti Sosial Masyarakat (swasta)						
5												
6												
7												
8						- LKS						
9												
10												
11												
12						- Rumah Singgah						
13												
14												
15												
16						- Puskesmas						

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM Kesos
- Kolom 3 : Diisi dengan angka "1" bila jenis SDM Kesos adalah "Pekerja Sosial"
- Kolom 4 : Diisi dengan angka "1" bila jenis SDM Kesos adalah "Penyuluh Sosial"
- Kolom 5 : Diisi dengan angka "1" bila jenis SDM Kesos adalah "TKS"
- Kolom 6 : Diisi dengan angka "1" bila jenis SDM Kesos adalah "Relawan Sosial"
- Kolom 7 : Diisi dengan nama lembaga atau sarana prasarana tempat bekerja (Dinsos, Kemensos, Nama lembaga Panti Asuhan, dsb)
- Kolom 8 : Diisi dengan angka "1" bila status SDM Kesos adalah "Pegawai Negeri Sipil"
- Kolom 9 : Diisi dengan angka "1" bila status SDM Kesos adalah "Masyarakat Sipil" (kontrak Kesos/Pensos/dsb)
- Kolom 10 : Diisi dengan angka "1" bila status SDM Kesos yang merekrut / pembinaan dari kementerian
- Kolom 11 : Diisi dengan angka "1" bila status SDM Kesos yang merekrut / pembinaan dari Pemerintah Provinsi
- Kolom 12 : Diisi dengan angka "1" bila status SDM Kesos yang merekrut / pembinaan dari Pemerintah Daerah/Kota
- Kolom 13 : Diisi dengan nomor SK pengangkatan/penetapan petugas sosial
- * : TRC adalah Tim Reaksi Cepat untuk penanganan/penanggulangan bencana/sosial yang ditetapkan dinsos/BPBD/Kesehatan yang berhubungan dengan penanganan bencana/darurat bencana
- *) : Total adal jumlah keseluruhan tiap kolom

**DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA											KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAA N KHUSUS KEDARURA TAN	TRC KETELANTA RAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEME N LOGISTIK	MANAJEME N SHELTER	KEPOSKOA N	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
	Total sarana prasarana yang ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																			
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota																		
	Total sarana prasarana yang ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																		

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kabupaten/Kota

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat kesejahteraan sosial
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana call center
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

**PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS
DI LUAR PANTI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar atau jumlah kwalitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti	<p>X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti</p>	<p>Rumus :</p> $\frac{X}{Y} \times 100\% = 100,00$ <p style="text-align: center;"> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100,00$ </p>

	A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, 1 1 1 1 1	a. Layanan data dan pengaduan	<p>a) Honor petugas</p> <p>b) Jumlah petugas</p> <p>c) Alat pengelolaan data (komputer, printer)</p> <p>d) Alat tulis kantor</p> <p>e) Sewa jaringan internet</p>	<p>a) Honor = Rp - / bulan</p> <p>b) Jumlah petugas = - orang</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>c) Alat pengelolaan data</p> <p>- komputer = - bh x Rp - = Rp -</p> <p>- printer = - bh x Rp - = Rp -</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>d) ATK</p> <p>- kertas = - rim x Rp - = Rp -</p> <p>- tinta printer = - bh x Rp - = Rp -</p> <p>- pulpen = - dos x Rp - = Rp -</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>e) jaringan internet = Rp - x - bln = Rp -</p>	<p>RUMUS = (a x b) + c + d + e</p> <p>Rp -</p>
	A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, 1 1 1 1 1	a. Layanan data dan pengaduan	<p>a) Honor petugas</p> <p>b) Jumlah petugas</p> <p>c) Alat pengelolaan data (komputer, printer)</p> <p>d) Alat tulis kantor</p> <p>e) Sewa jaringan internet</p>	<p>a) Honor = Rp - / bulan</p> <p>b) Jumlah petugas = - orang</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>c) Alat pengelolaan data</p> <p>- komputer = - bh x Rp - = Rp -</p> <p>- printer = - bh x Rp - = Rp -</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>d) ATK</p> <p>- kertas = - rim x Rp - = Rp -</p> <p>- tinta printer = - bh x Rp - = Rp -</p> <p>- pulpen = - dos x Rp - = Rp -</p> <hr/> <p>jumlah = Rp -</p> <p>e) jaringan internet = Rp - x - bln = Rp -</p>	<p>RUMUS = (a x b) + c + d + e</p> <p>Rp -</p>
	B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Layanan kedaruratan	<p>a) Transport petugas</p> <p>b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p>	<p>RUMUS = c + d</p> <p>c = kl x = Rp -</p> <p>d = ob x = Rp -</p> <hr/> <p>jumlah Rp -</p>

				<p>c) Alat pengelolaan data (komputer, printer)</p> <p>d) Alat tulis kantor</p> <p>e) Sewa jaringan internet</p>	<p>c) Alat pengelolaan data</p> <table border="0"> <tr> <td>- komputer</td> <td>=</td> <td>- bh x Rp</td> <td>- = Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- printer</td> <td>=</td> <td>- bh x Rp</td> <td>- = Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">jumlah</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> </table> <p>d) ATK</p> <table border="0"> <tr> <td>- kertas</td> <td>=</td> <td>- rim x Rp</td> <td>- = Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- tinta printer</td> <td>=</td> <td>- bh x Rp</td> <td>- = Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- pulpen</td> <td>=</td> <td>- dos x Rp</td> <td>- = Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">jumlah</td> <td>=</td> <td>Rp</td> </tr> </table> <p>e) jaringan internet = Rp - x - bln = Rp -</p>	- komputer	=	- bh x Rp	- = Rp	-	- printer	=	- bh x Rp	- = Rp	-	jumlah			=	Rp	- kertas	=	- rim x Rp	- = Rp	-	- tinta printer	=	- bh x Rp	- = Rp	-	- pulpen	=	- dos x Rp	- = Rp	-	jumlah			=	Rp																									
- komputer	=	- bh x Rp	- = Rp	-																																																													
- printer	=	- bh x Rp	- = Rp	-																																																													
jumlah			=	Rp																																																													
- kertas	=	- rim x Rp	- = Rp	-																																																													
- tinta printer	=	- bh x Rp	- = Rp	-																																																													
- pulpen	=	- dos x Rp	- = Rp	-																																																													
jumlah			=	Rp																																																													
	E. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Layanan kedaruratan	<p>a) Transport petugas</p> <p>b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p>c) Pemeliharaan kendaraan</p> <p>d) Honor petugas tim reaksi cepat</p>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti</p> <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas</p> <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki Panti Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke Panti Sosial Milik Masyarakat diwilayahnya</p>	<p>RUMUS = c + d</p> <table border="0"> <tr> <td>c</td> <td>=</td> <td>kl x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>=</td> <td>ob x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">jumlah</td> <td></td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>RUMUS = b + c + d</p> <table border="0"> <tr> <td>b</td> <td>=</td> <td>bh x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>=</td> <td>kl x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>=</td> <td>ob x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">jumlah</td> <td></td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>RUMUS = a + d</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>=</td> <td>kl x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>=</td> <td>ob x</td> <td>=</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">jumlah</td> <td></td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> </table>	c	=	kl x	=	Rp	-	d	=	ob x	=	Rp	-	jumlah				Rp	-	b	=	bh x	=	Rp	-	c	=	kl x	=	Rp	-	d	=	ob x	=	Rp	-	jumlah				Rp	-	a	=	kl x	=	Rp	-	d	=	ob x	=	Rp	-	jumlah				Rp	-
c	=	kl x	=	Rp	-																																																												
d	=	ob x	=	Rp	-																																																												
jumlah				Rp	-																																																												
b	=	bh x	=	Rp	-																																																												
c	=	kl x	=	Rp	-																																																												
d	=	ob x	=	Rp	-																																																												
jumlah				Rp	-																																																												
a	=	kl x	=	Rp	-																																																												
d	=	ob x	=	Rp	-																																																												
jumlah				Rp	-																																																												
	1. Standar SDM																																																																
	2. Standar sarana dan prasarana																																																																
		c. Penyediaan permakanan	<p>a) Penerima layanan per tahun</p> <p>b) Jumlah hari pemberian</p> <p>c) Indeks permakanan per orang per hari</p> <p>d) Transport petugas</p>	<p>a) Penerima layanan per tahun = - org</p> <p>b) Jumlah hari pemberian = - hari/thn</p> <p>c) Indeks permakanan per orang = Rp - kl/makanan</p> <p>jumlah = Rp -</p> <p>d) Transport petugas</p> <table border="0"> <tr> <td>- hari x</td> <td>- orang x Rp</td> <td>- =</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> </table>	- hari x	- orang x Rp	- =	Rp	-	<p>RUMUS = (a x b x c) + d</p> <p>Rp -</p>																																																							
- hari x	- orang x Rp	- =	Rp	-																																																													

		h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan gepeng		<p>a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial</p> <p>b) Pembelian alat peraga</p> <p>c) Transport petugas</p> <p>d) biaya transportasi penyandang disabilitas</p>	<p>a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial</p> $\text{bln} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>b) Pembelian alat peraga</p> $\text{.....} \quad = \quad \text{bh} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ $\text{.....} \quad = \quad \text{bh} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ $\text{.....} \quad = \quad \text{bh} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ $\text{.....} \quad = \quad \text{bh} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>c) Transport petugas</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>d) biaya transportasi penyandang disabilitas</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$	<p>RUMUS = a + b + c</p> <p>Rp</p>
		j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		<p>a) Transport petugas</p> <p>b) Transport penerima layanan</p> <p>b) Transport penerima layanan</p>	<p>a) Transport petugas</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>b) Transport penerima layanan</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$	<p>RUMUS = a + b</p> <p>Rp</p>
		k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		<p>a) Transport petugas</p> <p>b) Transport penerima layanan</p> <p>b) Transport penerima layanan</p>	<p>a) Transport petugas</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>b) Transport penerima layanan</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$	<p>RUMUS = a + b</p> <p>Rp</p>
		l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		<p>Biaya perjalanan pekerja sosial profesional</p> <p>b) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional</p>	<p>a) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$ <p>b) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional</p> $\text{hari} \quad x \quad \text{orang} \quad x \quad = \quad \text{Rp}$	<p>Sesuai dengan standar biaya</p> <p>Rp</p>

		m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		<p>a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional</p> <p>b) Biaya transport penerima layanan</p> <p>c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga</p>	<p>a) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional Rp hari x orang x = Rp -</p> <p>b) Biaya transport penerima layanan Rp hari x orang x = Rp - hari x orang x = Rp -</p> <p>c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi Rp hari x orang x = Rp - hari x orang x = Rp -</p>	<p>Sesuai dengan standar biaya</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p>
		n. Layanan rujukan		<p>a) Transport petugas</p> <p>b) Transport penerima manfaat</p>	<p>a) Transport petugas Rp hari x orang x = Rp -</p> <p>b) Transport penerima layanan Rp hari x orang x = Rp -</p>	<p>RUMUS = a + b</p> <p>Rp -</p> <p>Rp -</p>

**PERHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM SOSIAL KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	<p>X= Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan L21 dasarnya</p> <p>Y= Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota</p>	$X = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\% = \text{---} \#DIV/0!$	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan	<p>a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas</p> <p>c) Biaya pengiriman</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun</p> <p>e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun</p> <p>f) Indeks permakanan per orang per hari</p>	<p>a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji Rp -</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas</p> <p>Transport petugas Rp -</p> <p>hari x orang x = Rp -</p> <p>c) Biaya pengiriman Rp -</p> <p>hari x = Rp -</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun</p> <p>- bencana sosial = jiwa</p> <p>- bencana alam = jiwa</p> <p>jumlah = - jiwa</p> <p>e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun</p> <p>- bencana sosial = jiwa</p> <p>- bencana alam = jiwa</p> <p>jumlah = - jiwa</p> <p>f) Indeks permakanan per orang per hari</p> <p>Rp - kl/makanan</p>	<p>RUMUS = a + b + c</p> <p>*a = d x e x f</p> <p>= Rp -</p>	Jumlah LKS/ Rumah Singgah untuk Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis

		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang	<p>a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas</p> <p>c) Biaya pengiriman</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana per</p> <p>e) Indeks sandang per orang per kejadian</p>	<p>a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids Rp -</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas Rp - hari * orang * = Rp -</p> <p>c) Biaya pengiriman Rp - hari * = Rp -</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun -bencana sosial = jiwa -bencana alam = jiwa jumlah = - jiwa</p> <p>e) Indeks sandang per orang per kejadian Rp 80.000 /pasang pakain</p>	<p>RUMUS = a + b + c *a = d x e = Rp</p>	Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	<p>a) Paket penyediaan tempat penampungan</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas</p> <p>c) Biaya pengiriman</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana per</p> <p>e) Indeks tempat penampungan pengungsi</p>	<p>a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi Rp -</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas Rp - hari * orang * = Rp -</p> <p>c) Biaya pengiriman Rp - hari * = Rp -</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun -bencana sosial = jiwa -bencana alam = jiwa jumlah = - jiwa</p> <p>e) Indeks tempat penampungan pengungsi /penampungan</p>	<p>RUMUS = a + b + c *a = d x e = Rp</p>	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi)

		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	<p>a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak)</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas</p> <p>c) Biaya pengiriman</p> <p>d) Perkiraan jumlah kelompok rentan</p> <p>e) Indeks penanganan khusus</p>	<p>a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak) Rp -</p> <p>b) Biaya perjalanan/ transport petugas Rp - hari x orang x = Rp -</p> <p>c) Biaya pengiriman Rp - hari x = Rp -</p> <p>d) Perkiraan jumlah kelompok rentan - bencana sosial = jiwa - bencana alam = jiwa jumlah = - jiwa</p> <p>e) Indeks penanganan khusus Rp - /penanganan</p>	<p>RUMUS = a + b + c *a = d x e</p> <p>= Rp -</p>
			e. Pelayanan dukungan psikososial	<p>a) Pengadaan paket alat bantu dukungan</p> <p>b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial</p> <p>c) Biaya pengiriman</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana</p> <p>e) Indeks dukungan psikososial</p>	<p>a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Rp -</p> <p>b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial Rp - hari x orang x = Rp -</p> <p>c) Biaya pengiriman Rp - hari x = Rp -</p> <p>d) Perkiraan jumlah korban bencana - bencana sosial = jiwa - bencana alam = jiwa jumlah = - jiwa</p> <p>e) Indeks dukungan psikososial Rp - /dukungan psikososial</p>	<p>RUMUS = a + b + c *a = d x e</p> <p>= Rp -</p>

**RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, PENGEMIS GEPENG TERLANTAR DALAM PANTI
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR																									
	total																									
	ANAK TERLANTAR																									
	total																									
	LANSIA TERLANTAR																									
	total																									

**RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	total										Rp			Rp			Rp			Rp			Rp		Rp	

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

**REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, PENGEMIS GEPENG DI LUAR PANTI
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN.....**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	ORG									
2	ANAK TERLANTAR	ORG									
3	LANSIA TERLANTAR	ORG									
4	PENGEMIS GEPENG	ORG									

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) berdasarkan form 6.C.1
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakuka

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

IPSPM =	$\frac{(\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})}{2}$
---------	---

Keterangan:

- | | |
|--|--|
| IPSPM | = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 |
| Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar | = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis |
| Persentase pencapaian penerima layanan dasar | = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini |
| BM | = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 |
| BP | = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80 |

Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DISKRIPSI
1	100	Pencatatan Saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data,

			penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.
--	--	--	--

Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan :

- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
- Persentase pencapaian mutu barang = Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
- Persentase pencapaian mutu jasa = Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
- Persentase pencapaian mutu SDM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
- N = Jumlah variabel pembagi

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK